

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- Aburaera, Sukarna, *et al.*, 2013, *Filsafat Hukum Teori & Praktik*, Kencana, Jakarta.
- Ashiddiqie, Jimly, 2004, *Format Kelembagaan Negara Dan Pergeseran Kekuasaan Dalam UUD 1945*, FH UII Press, Yogyakarta.
- \_\_\_\_\_, 2012, *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Ashiddiqie, Jimly dan Ahmad Syahrizal, 2011, *Peradilan Konstitusi di Sepuluh Negara*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Asikin, Zainal, 2012, *Pengantar Ilmu Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Ali, Zainuddin, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Azhary, 1995, *Negara Hukum Indonesia: Analisis Yuridis Normatif Tentang Unsur-Unsurnya*, UI Press, Jakarta.
- Bachtiar, 2015, *Problematisasi Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Pada Pengujian UU Terhadap UUD*, Raih Asa Sukses, Jakarta.
- Dirdjosisworo, Soedjono, 2010, *Pengantar Ilmu Hukum*, Rajawali Press, Jakarta .
- Fadjar, Abdul Mukthie 2006, *Hukum Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi*, Konstitusi Press, Jakarta.
- Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Falakh, Mohammad Fajrul, 2014, *Pertumbuhan dan Model Konstitusi Serta Perubahan UUD 1945 Oleh Presiden, DPR dan Mahkamah Konstitusi (The Growth, Model and Informal Changes of An Indonesian Constitution)*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Fatmawati, 2005, *Hak Menguji (Toetsingrecht) Yang Dimiliki Hakim Dalam Sistem Hukum Di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Huda, Ni'matul, 2010, *Hukum Tata Negara Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

- \_\_\_\_\_, 2014, *Desentralisasi Asimetris dalam NKRI*, Nusa Media, Bandung.
- Huda, Ni'matul dan R. Nazriyah, 2011, *Teori & Pengujian Peraturan Perundang-Undangan*, Nusa Media, Bandung.
- Huijbers, Theo, 1982, *Filsafat Hukum dalam Lintas Sejarah*, Kanisius, Yogyakarta.
- \_\_\_\_\_, 1990, *Filsafat Hukum*, Kanisius, Yogyakarta.
- Isra, Saldi, 2010, *Pergeseran Fungsi Legislasi: Menguatnya Model Legislasi Parlementer dalam Presidensial Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Kelsen, Hans, 1961, *General Theory of Law and State*, Russell & Russell, New York.
- \_\_\_\_\_, 1973, *Teori Umum tentang Hukum dan Negara*, Nusa Media, Bandung.
- \_\_\_\_\_, 1978, *Pure Theory of Law*, Univesity California Press, Berkely.
- Laica Marzuki, M., 2006, *Berjalan-jalan di Ranah Hukum*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta.
- Latif, Abdul, 2009, *Fungsi Mahkamah Konstitusi*, Kreasi Total Media, Yogyakarta.
- Latif, Abdul, *et al.*, 2009, *Buku Ajar Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Total Media, Yogyakarta.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2008, *Lima Tahun Menegakkan Konstitusi*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2009, *Enam Tahun Mengawal Konstitusi dan Demokrasi, Gambaran Singkat Pelaksanaan Tugas Mahkamah Konstitusi 2003-2009*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Cetakan Pertama, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2010, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta.
- Mahmud Marzuki, Peter, 2008, *Pengantar Hukum Indonesia*, Kencana, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum Edisi Revisi*, Kencana, Jakarta.

- Martitah, 2013, *Mahkamah Konstitusi dari Negative Legislature ke Positive Legislature*, Konstitusi Press, Jakarta.
- Mas, Marwan, *et al.*, 2004, *Renungan Akhir Tahun Menegakkan Konstitusionalisme dan Rule Of Law dalam Menjaga Denyut Konstitutusi*, Konstitusi Press, Jakarta.
- Mertokusumo, Sudikno, 1996, *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta.
- \_\_\_\_\_, 2005, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta.
- \_\_\_\_\_, 2005, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.
- Muhammad, Abdulkadir, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, , Bandung.
- MD, Moh. Mahfud, 2010, *Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu*, Rajawali Pers, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2011, *Perdebatan Hukum Tata Negara*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Nawawi, Hadari, 2005, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Pacelle Jr., Richard L., 2002, *The Role of The Supreme Court in American Politics: The Least Dangerous Branch?*, Westview Press, United States of America.
- P. Powers, Stephen and Stanley Rothman, 2002, *The Least Dangerous Branch?: Consequence of Judicial Activism*, Praeger Publishers, United States of America.
- Prasetyo, Teguh, 2010, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Roosevelt III, Kermit, 2006, *The Myth of Judicial Activism: Making Sense of Supreme Court Decisions*, Yale Univesity Press, United States of America.
- Sarip dan Achmad Rizky Pratama, 2008, *Mengungkap Wajah Peradilan Tata Negara Indonesia*, Genta Press, Yogyakarta.
- Siahaan, Maruar, 2004, *Renungan Akhir Tahun Menegakkan Konstitusionalisme dan Rule Of Law dalam Menjaga Denyut Konstitutusi*, Konstitusi Press, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2011, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

Simpson, Brian, 1986, *The Common Law and Legal Theory in Legal Theory and Common Law* edited by William Twining, Basil Blackwell, New York.

Soedarsono, 2008, *Kontroversi Atas Putusan Mahkamah Konstitusi, Catatan Hakim Konstitusi Soedarsono*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta.

\_\_\_\_\_, 2008, *Putusan Mahkamah Konstitusi Tanpa Mufakat Bulat*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta.

Soekanto, Soerjono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 2007, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Soemitro, Rony Hanitijo, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Sholikin, et.al, M. Nur 2007, *Pengujian Undang-Undang dan Proses Legislasi*, PSHK Press, Jakarta.

Sri Soemantri, 1997, *Hak Uji Material di Indonesia*, Alumni, Bandung.

Sukriono, Didik 2013, *Hukum, Konstitusi dan Konsep Otonomi*, Setara Press, Malang.

Titik Triwulan Tutik, 2011, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, Kencana, Jakarta.

W. Bedner, Adriaan, 2010, *Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia*, HuMa, Jakarta.

Zoelva, Hamdan, 2011, *Pemakzulan Presiden di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4316.

Undang-Undang No. 8 Tahun 2011 tentang Nomor Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5226.

Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4250.

Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886.

Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4026.

Undang-Undang No. 16 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Pada Peristiwa Peledakan Bom Di Bali Tanggal 12 Oktober 2002, Menjadi Undang-Undang, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4285.

Undang-Undang No. 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Sorong, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3894.

Undang-Undang No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4151.

UU No. 5 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Sorong, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3960.

UU No. 16 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2008 (UU APBN 2008), Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4848.

UU No. Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836.

Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 06/ PMK/ 2005 tentang Pedoman dalam Perkara Pengujian Undang-Undang.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4232.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Pada Peristiwa Peledakan Bom Di Bali Tanggal 12 Oktober 2002, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4233.

Statuta Roma Tahun 1998

*International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)*

*United Nations Universal Declaration of Human Rights (UNDHR)*

### C. **Putusan**

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 016/ PUU-IV/2006 perihal *Pengujian UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, 19 Desember 2006.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 013/PUU-I/2003 perihal *Pengujian Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2002 Tentang Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Secara Retroaktif Untuk Peristiwa Bom Bali*, 23 Juli 2004.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 018/PUU-I/2003 perihal *Pengujian Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Barat*, 14 November 2003.

Putusan Nomor 110-111-112-113/PUU-VII/2009 perihal *Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan*

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 6 Agustus 2009.

Putusan Nomor 13/PUU-VI/2008 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2008 (UU APBN 2008), 13 Agustus 2008.

Putusan Nomor 012/PUU-III/2005 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2004 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2005, 19 Oktober 2005.

Putusan Nomor 026/PUU-III/2005 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2006, 22 Maret 2006.

Putusan Nomor 026/PUU-IV/2006 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2006 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2007, 1 Mei 2007.

Putusan Nomor 026/PUU-IV/2006 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2006 tentang APBN 2007, 1 Mei 2007.

#### **D. Jurnal Hukum**

Carter, Frank Kantorowicz, “*Gustav Radbruch and Hermann Kantorowicz: Two Friends and a Book – Reflections on Gnaeus Flavius’ Der Kampf um die Rechtswissenschaft*” German Law Journal.

Eddy O.S. Hiariej, “*Telaah Kritis Putusan MK dan Dampaknya Terhadap Pemberantasan Korupsi*”, *Mimbar Hukum*, Vol. 18/ No. 3/ Oktober 2006.

Mujiyana dan Maulana MPMDs, “*Perbandingan Uji Materil Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dan Dewan Konstitusi Perancis*”, *Jurnal Konstitusi* Vol. III No. 1 Juni 2010.

Nindyo Pramono, “*Problematisa Putusan Hakim dalam Perkara Pembatalan Perjanjian*”, *Mimbar Hukum*, Vol. 22/ No.2/ Juni 2010.

Latif, Yudi, 2004, *Masa Depan Papua Pasca Keputusan Mahkamah Konstitusi dalam Jurnal Konstitusi* Vol. 1 No.2 Desember 2004, Mahkamah Konstitusi, Jakarta.



Indrati S., Maria Farida, *“Langkah Panjang Menuju Realisasi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua” Jurnal Konstitusi Vol.1 No.2 Desember 2004.*

Martitah, *“Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 013/PUU-I/2003 dalam Penegakan Hukum Terhadap Perkara Bom Bali I (Satu)”*, *Jurnal Konstitusi Vol.1 No.1 November 2008.*

Mas, Marwan, *“Mengurai Putusan Pembatalan UU Nomor 45 Tahun 1999”*, *Jurnal Konstitusi Vol. 1 No. 2 Desember 2004.*

Indrayana, Denny dan Zainal Arifin Mochtar, *“Komparasi Sifat Mengikat Putusan Judicial Review Mahkamah Konstitusi dan Pengadilan Tata Usaha Negara”*, *Mimbar Hukum Vol. 19 No. 3 Oktober 2007.*

Editorial Jurnal Konstitusi, *“Keabsahan Pemilu Serentak 2014”*, *Jurnal Konstitusi No. 84 Februari 2014.*

Laporan Utama Jurnal Konstitusi, *“Keabsahan Pemilu Serentak 2014”*, *Jurnal Konstitusi No. 84 Februari 2014.*

Gaffar, Janedjri M., *“Pemilu Serentak”*, *Jurnal Konstitusi No. 84 Februari 2014.*

Rahman, Taufik, *“Asas Retroaktif dalam Hukum Acara Pidana Menurut Putusan MK No. 012-016-019/PUU-IV/2006*, *Jurnal Konstitusi Vol-04 No-01 Maret 2007*

Anggraeni, Ricca, *“Pengusungan Pola Pikir Positivisme Hukum Dalam Perkara Korupsi”*, *Jurnal Yudisial, Vol-IV/No.-03/Desember/2011.*

#### **E. Makalah, Dokumen dan Hasil Penelitian**

Laporan Utama, *“Putusan Ultra Petita Konstitusional”*, *Majalah Konstitusi*, 57 Oktober 2011.

Moh. Mahfud MD., *“Rambu Pembatas dan Perluasan Kewenangan Mahkamah Konstitusi”*, Makalah, disampaikan di depan Komisi III DPR-RI pada saat *fit and proper test* untuk menjadi hakim konstitusi, Jakarta, 12 Maret 2008.

Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2013,



*Model dan Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-Undang (Studi Putusan Tahun 2003-2012)*, Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta.

Tim Peneliti Pusat Penelitian dan Pengkajian Mahkamah Konstitusi RI, 2006, *Papua Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi*, Hasil Penelitian, Mahkamah Konstitusi, Jakarta.

Tim Penyusun Laporan Tahunan Mahkamah Konstitusi 2012, *Dinamika Penegakan Hak Konstitusional Warga Negara, Laporan Tahunan Mahkamah Konstitusi RI 2012*, Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, Jakarta.

Tim Penyusun Laporan Tahunan Mahkamah Konstitusi, 2015, *Menegakkan Konstitusionalisme Dalam Dinamika Politik, Laporan Tahunan Mahkamah Konstitusi RI 2014*, Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, Jakarta.

Tim Penyusun Sinopsis dan Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi serta Kompilasi Penafsiran Mahkamah Konstitusi terhadap UUD 1945 Tahun 2003 – 2008, 2008, *Ikhtisar Putusan Mahkamah Konstitusi 2003-2008*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta.

#### **F. Wawancara**

Wawancara dengan Hakim Mahkamah Konstitusi Maria Farida Indrati di Mahkamah Konstitusi, Yang berkedudukan di Jakarta, Jumat, 10 Oktober 2014.

Wawancara dengan Peneliti Pusat Studi Hukum Tata Negara Universitas Indonesia Qurrata Ayuni, di Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, Rabu 8 Oktober 2014.

#### **G. Internet**

Agus Sahbani dan Ali Amande, Ketua MK: Bubarkan Pengadilan Tipikor Daerah, <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4eb4038a2a5b4/bubarkan-pengadilan-tipikor-daerah->, diakses 9 september 2015.

Azhar Azis, Ekses dan Perubahan Pada Pemilu 2014, <http://www.dpr.go.id/doksetjen/dokumen/minangwan-seminar-POLEMIK-JELANG-PEMILU-SUKSESI-KEPEMIMPINAN-1427267606.pdf>, diakses 9 September 2015.

Jimly Ashiddiqie, “*Sejarah Constitutional Review dan Gagasan Pembentukan MK*”,  
<http://www.jimlyschool.com/read/analisis/276/sejarah-constitutional-review-gagasan-pembentukan-mk/>, diakses 18 Februari 2015.

Sarifuddin Suding, Polemik Jelang Pemilu 2014,  
<http://www.dpr.go.id/doksetjen/dokumen/minangwan-seminar-POLEMIK-JELANG-PEMILU-SUKSESI-KEPEMIMPINAN-1427267606.pdf>, diakses 9 September 2015.

#### H. Kamus

Bryan A. Garner, 1999, *Black's Law Dictionary*, St. Paul Minn, West Group.